

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan bertanggung jawab yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi diri peserta didik agar menjadi manusia yang dewasa. Pendidikan juga tidak hanya perlu dimaknai sebagai tradisi belajar mengajar seperti membaca dan menghitung di dalam kelas saja. Tapi bisa saja didefinisikan sebagai sebuah proses bimbingan peserta didik guna mengantarkan mereka meraih cita-cita tertentu dengan melibatkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Karena itu, orang-orang dewasa di sekitar peserta didik menjadi sebuah hal yang penting dalam rangka memberikan bimbingan, arahan dan dorongan agar mereka bisa mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapainya. Mengingat anak-anak didik yang masih berada di usia kanak-kanak hingga remaja masih dianggap memiliki seperangkat moral yang heteronom, yang memungkinkan bagi mereka untuk membutuhkan pendapat orang-orang yang lebih dewasa (pendidik) di sekitarnya, terutama untuk membantu mereka menemukan pedoman sikap dan tingkah laku kepada orang-orang di lingkungannya,¹ atau dengan kata lain kehadiran orang-orang dewasa di sekitar anak-anak ini mutlak diperlukan, terutama yang mampu memainkan peran

¹ Lihat Suyabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT. Rajagrafindo persada, 2013), hlm. 297.

sebagai pihak yang lebih stabil dalam memecahkan masalah ataupun keputusan tertentu. Selain tentu saja, kehadiran orang-orang dewasa ini diharapkan mampu dijadikan sebagai rujukan dan diteladani (*rule of model*) oleh anak-anak selama proses pendidikan berlangsung.

Berbicara lebih jauh mengenai tujuan pendidikan, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menghendaki terciptanya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain tujuan konstitusional sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, tujuan penting pendidikan juga seharusnya bisa fokus pada perolehan keterampilan dasar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher-order skill*) di seluruh tingkat pendidikan dan perkembangannya, akses yang lebih besar dan adil kepada pendidikan berkualitas di seluruh tingkatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi, pengetahuan, keterampilan dan nilai yang diperlukan untuk dapat berfungsi dengan baik dan berkontribusi kepada masyarakat.²

Mempertimbangkan berbagai tujuan yang bisa saja disepakati seutuhnya, maka peran dan fungsi pemerintah dalam hal ini tidak semudah yang dibayangkan. Mengingat pendidikan merupakan sebuah proses seumur hidup yang secara teknis tentu perlu melibatkan banyak aktor yang aktif berpartisipasi

² Lihat Unicef.org.

dan berkontribusi di dalamnya. Karena itulah, diperlukan kerja sama dan sinergisitas dari pilar-pilar pembangunan seperti masyarakat dan swasta yang terlibat aktif di dalamnya. Karena sinergisitas berbagai pihak akan sangat membantu proses peningkatan kualitas pendidikan, baik dalam segi sarana prasarana, peserta didik, tenaga pendidik, pengembangan kurikulum dan masih banyak lainnya. Mengingat prosesnya yang tidak sebentar dan memperhatikan banyak aspek lainnya seperti visi misi, tujuan dan strategi yang hendak dicapai secara jelas serta terukur.

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting untuk membentuk dan membangun kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Dimana semakin tinggi kualitas pendidikan yang berhasil dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas manusianya, begitu juga sebaliknya. Maka tak heran jika pendidikan menjadi salah satu sektor strategis sekaligus vital dalam rangka mengukur indeks pembangunan manusia (IPM) di suatu negara. Dimana dalam hal ini, pendidikan sudah harus berjalan sesuai formatnya yang dituntut dinamis, berlaku secara universal, tak mengenal batas wilayah (*borderless*), tidak mengenal bias dan tentu saja perlu dilaksanakan ke dalam langkah-langkah kerja yang terukur.

Proses penyelenggaraan pendidikan, mutlak diselenggarakan dan dijamin oleh negara. Mengingat negara memiliki tanggung jawab utama sebagai pihak otoritatif yang melindungi hak, memberikan jaminan dan tentu mengupayakan segala hal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di

dalamnya. Hal ini bahkan sudah tersusun melalui seperangkat kebijakan dan langkah-langkah strategis.

Dengan memperhatikan tujuan, proses serta strategi seperti yang sudah digambarkan di atas, maka pendidikan sudah seharusnya diejawantahkan ke dalam kerangka kerja yang lebih operasional, riil dan sistematis. Bahkan, pendidikan dan kebijakan yang mbingkainya perlu dirancang sedemikian rupa untuk membuka peluang-peluang partisipasi, memberdayakan, dilakukan secara gradual serta sistematis. Dimana pemangku otoritas dan tanggung jawab tertinggi adalah pemerintah dibandingkan aktor-aktor lainnya seperti masyarakat dan swasta.

Pemerintah dalam proses pendidikan bisa saja memainkan peran sebagai lembaga yang memegang kekuasaan otoritatif sekaligus juga pembuat kebijakan (*decision maker*), yang tentu saja, kebijakan-kebijakan tersebut harus tetap diproduksi bukan hanya untuk menyukseskan program-program yang ada. Tapi mendorong partisipasi masyarakat baik yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, evaluasi hingga dampak kebijakan yang dihasilkan, yang tentu saja keseluruhan proses tersebut tetap berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan.

Salah satu bentuk komitmen serius pemerintah untuk mulai membangun dan mendorong kualitas di dunia pendidikan, dibuktikan dengan penandatanganan komitmen global resolusi PBB 70/1 yang menyatakan siap berperan aktif dalam

rangka mendorong berhasilnya pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan rencana aksi global yang dirancang untuk menyempurnakan program pembangunan sebelumnya yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs).³ Dimana dalam SDGs ini, pemerintah dimaksudkan untuk melindungi dan membangun bumi serta seluruh manusia di dalamnya tak terkecuali dalam bidang pendidikan.

Meskipun pemerintah sudah menunjukkan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan tidak serta merta hilang begitu saja. Sebaliknya, problematika di dunia pendidikan justru semakin banyak bermunculan dan memerlukan kajian yang serius untuk mengatasinya.

Selain pemerintah, masyarakat juga perlu terlibat aktif, dinamis sekaligus juga partisipatif untuk memonitoring jalannya proses pendidikan yang bisa

³Pada bulan September tahun 2000, perwakilan dari 189 negara menandatangani deklarasi yang disebut sebagai Millennium Declaration yang mengandung delapan poin dan harus dicapai sebelum tahun 2018. Negara-negara yang membuat kesepakatan tersebut bukan saja negara kaya tetapi juga negara-negara miskin dan berkembang. Delapan poin ini tergabung dalam tujuan yang dinamakan sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Di Indonesia MDGs disebut sebagai Tujuan Pembangunan Milenium. Delapan kesepakatan dalam MDGs tersebut adalah berisi *pertama*, penanggulangan kemiskinan dan kelaparan (*eradicate extreme poverty and hunger*). *Kedua*, mencapai pendidikan dasar untuk semua (*achieve universal primary education*). *Ketiga*, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*promote gender equality and women empowerment*). *Keempat*, menurunkan angka kematian anak (*reduce child mortality*). *Kelima*, meningkatkan kesehatan ibu (*increase maternal health*). *Keenam*, memerangi IDV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya (*combat HIV/AIDS, malaria and other diseases*). *Ketujuh*, memastikan kelestarian lingkungan hidup (*ensure environment sustainability*). *Kedelapan*, membangun kemitraan global untuk pembangunan (*develop a global partnership for development*). Lihat Dyah Ratih Sulistyastuti. *Pembangunan pendidikan dan MDGs di indonesia* Sebuah Refleksi Kritis. hlm. 22-23.

diakses oleh siapa saja secara adil dan merata, tanpa bias gender, status sosial ekonomi maupun geografi. Masyarakat dalam hal ini, bisa jadi menjadi pilar terpenting ketika membicarakan soal proses dan capaian tujuan pendidikan. Dimana masyarakat bisa memainkan peran gandanya dalam hal ini, entah sebagai subjek ataupun objek sasaran pendidikan. Karena itulah, pembenahan pembangunan masyarakat terutama yang berkaitan dengan aspek pendidikannya menjadi hal yang sangat penting dan mendorong pembenahan-pembenahan di sektor lainnya (*multiplier effect*).

Selain pemerintah dan masyarakat, masih ada satu lagi pihak yang tidak bisa diabaikan eksistensi dan peranannya, yaitu swasta. Pihak swasta tentu saja bisa memainkan peran yang tidak bisa diisi oleh pemerintah ataupun masyarakat. Dimana pihak swasta dalam hal ini bisa menjadi fasilitator yang menyediakan berbagai produk-produk yang bisa membantu peningkatan kualitas maupun kuantitas pendidikan melalui beasiswa, kerja sama, kolaborasi, *corporate social responsibility* (CSR), ataupun ragam aktivitas lainnya yang menunjang penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat melalui produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Keterlibatan ketiga pihak ataupun elemen pendidikan; pemerintah, masyarakat dan swasta diharapkan mampu menjadi modal utama untuk membangun kekuatan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan terutama dalam membenahi masalah-masalah pendidikan yang ada. Sudah menjadi hal

yang umum diketahui ketika mengkaji perihal dunia pendidikan dan carut marut di dalamnya. Keadaan rumit yang biasanya dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan, kurang partisipasi, ketimpangan akses, kesenjangan kelas sosial ekonomi, sarana, prasarana, sumber daya manusia, finansial dan masih banyak lainnya.

Lebih jauh, masalah di dunia pendidikan semakin diperparah lagi dengan munculnya kasus korupsi anggaran pendidikan di satu sisi dan anak-anak putus sekolah di sisi yang lain. Penulis melansir pemetaan terkait korupsi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh (*Indonesia Corruption Watch*). Dimana dinas pendidikan menjadi lembaga yang rentan korupsi, disusul sekolah, universitas, pemkab/pemkot dan pemerintah provinsi. Terhitung semenjak tahun 2005 sampai 2016 ada sekitar 425 kasus korupsi. Sebanyak 214 kasus korupsi pendidikan terjadi di dinas pendidikan. Objek korupsi pendidikan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), sarana dan prasarana sekolah, dana BOS hingga infrastruktur sekolah serta dana buku.

Peluang munculnya kasus korupsi ini menjadi hal yang masuk akal ketika sebagian besar anggaran pendidikan memang dikelola oleh dinas pendidikan daerah. Mengingat total anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp 424,7 triliun dikelola oleh dinas pendidikan daerah, 33,8 persen dikelola oleh pemerintah pusat dan 64,9 persen dikelola oleh lembaga pendidikan daerah-daerah.⁴ Sementara itu,

⁴Artikel ini telah tayang di [Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) dengan judul ICW Ungkap Korupsi di Dunia Pendidikan, Dinas Pendidikan urutan Teratas, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/24/icw-ungkap->

anggaran yang seharusnya diserap dengan baik oleh peserta didik maupun lembaga pendidikan justru malah masuk ke dalam kantong-kantong pribadi para birokrat yang bermain di sana.

Sebaliknya, anak-anak putus sekolah menjadi fenomena menarik dan selalu mengundang perhatian untuk terus-menerus dikaji, seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa atau karena memang buntu lantaran tidak menemukan solusi terbaik untuk bisa menekan angka putus sekolah ini terus saja bertambah. Miris memang, ketika menjumpai anak-anak usia sekolah yang justru sibuk bekerja mencari nafkah di sepanjang jalan raya. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian beralih aktivitasnya menjadi pengamen, pengemis, penjual aksesoris-aksesoris kendaraan roda empat, menjual makanan ataupun minuman dan yang lainnya. Dimana keadaan ini sangat berbanding terbalik dengan anak-anak dari kelas menengah ke atas yang asyik berburu masuk ke sekolah favorit, bergengsi sekaligus juga mahal. Karena itulah diperlukan tatanan sistem yang mengedepankan keadilan dan menghilangkan ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan.

Sistem pendidikan nasional sudah seharusnya berubah dan menyesuaikan diri terhadap proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman, memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah pinggiran kota maupun pedesaan (*urban fringe*), serta mendorong peningkatan partisipasi

masyarakat. Terutama dalam rangka menjawab kebutuhan dan tanggung jawab moral pemerintah dalam mempersiapkan, menyediakan serta mengembangkan dunia pendidikan. Kondisi ini tentu saja menjadi dilema dan bisa mempengaruhi kualitas pendidikan ke depannya. Masalah-masalah yang sudah penulis jabarkan di atas, pada akhirnya akan semakin sulit diatasi jika tidak diiringi disertai dengan komitmen serius dari berbagai elemen untuk ikut campur membenahi dunia pendidikan.

Salah satu bentuk, program pendidikan yang diproduksi pemerintah dan diharapkan mampu mewadahi partisipasi secara luas dari masyarakat adalah melalui Program Indonesia Pintar. Dimana program yang disebut-sebut sebagai program unggulan ini dilahirkan untuk mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan bagi siswa miskin dan rentan putus sekolah. Agar bisa terus mengakses pendidikan.

Program Indonesia Pintar memang bukan merupakan program baru. Program ini bahkan dilahirkan setelah melakukan transformasi dan penyempurnaan berkali-kali pada program sebelumnya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM), Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar ini perlu dilakukan dengan langkah yang lebih serius lagi. Tidak tanggung-tanggung, tiga kementerian disebut-sebut berperan aktif di dalamnya yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta

Kementerian Agama. Semakin banyaknya kementerian yang terlibat tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di bidang pendidikan bisa terwujud. Terutama yang berkaitan erat dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat miskin. Meskipun tidak menutup kemungkinan jika justru menyulitkan arus koordinasi di antara ketiganya.

Sudah menjadi hal yang sangat penting ketika pendidikan dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang dimaksudkan untuk memperoleh pendidikan yang layak⁵ dan bisa diakses secara merata oleh siapa saja, khususnya bagi masyarakat miskin. Keseriusan pemerintah, setidaknya bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Tujuannya adalah untuk *pertama*, mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 Tahun. *Kedua*, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*Drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. *Ketiga*, menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau balai latihan kerja.⁶ Selain tujuan-tujuan tersebut, Program Indonesia Pintar juga bertujuan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan,

⁵Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (UU RI Nomor 20 Tahun 2003), Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hlm. 5

⁶Lihat jdih kemdikbud.go.id/arsip/permendikbud.

mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun nonformal.

Program yang sengaja dirancang untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/ sederajat ini juga merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada sasaran penerima manfaat Program Indonesia Pintar. KIP ini diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya.

PIP dimulai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dicairkan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko siswa putus sekolah karena tidak adanya biaya. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp225.000,-/semester (Rp450.000,-/tahun), tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B sebesar Rp375.000,-/semester (Rp750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp500.000,-/semester (Rp1.000.000,-/tahun), serta

Rp1.000.000,- untuk Peserta Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun.

Selain diperuntukkan bagi peserta didik di lembaga formal, PIP ini juga menyasar siswa-siswa di lembaga nonformal yang memiliki jenjang pendidikan setara dengan sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas dalam format pendidikan kesetaraan Paket A/B/C yang dipusatkan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan juga Peserta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). PIP juga dapat digunakan untuk mengikuti program yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kementerian Ketenagakerjaan⁷.

Berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Cirebon sudah melaksanakan Program Indonesia Pintar ini sejak dirintis dari tahun 2016 lalu. Khususnya di wilayah Kecamatan Harjamukti yang merupakan wilayah yang penulis anggap paling representatif mengingat jumlah angka putus sekolah yang tinggi, memiliki wilayah pinggiran kota (*urban fringe*) yang khas yaitu desa kota, serta memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam mega proyek Metropolitan Cirebon Raya (MCR).⁸ Karena itu, Kecamatan Harjamukti perlu memperhatikan pembangunan di dunia pendidikan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan ke depannya. Terutama dalam rangka mencapai visi untuk

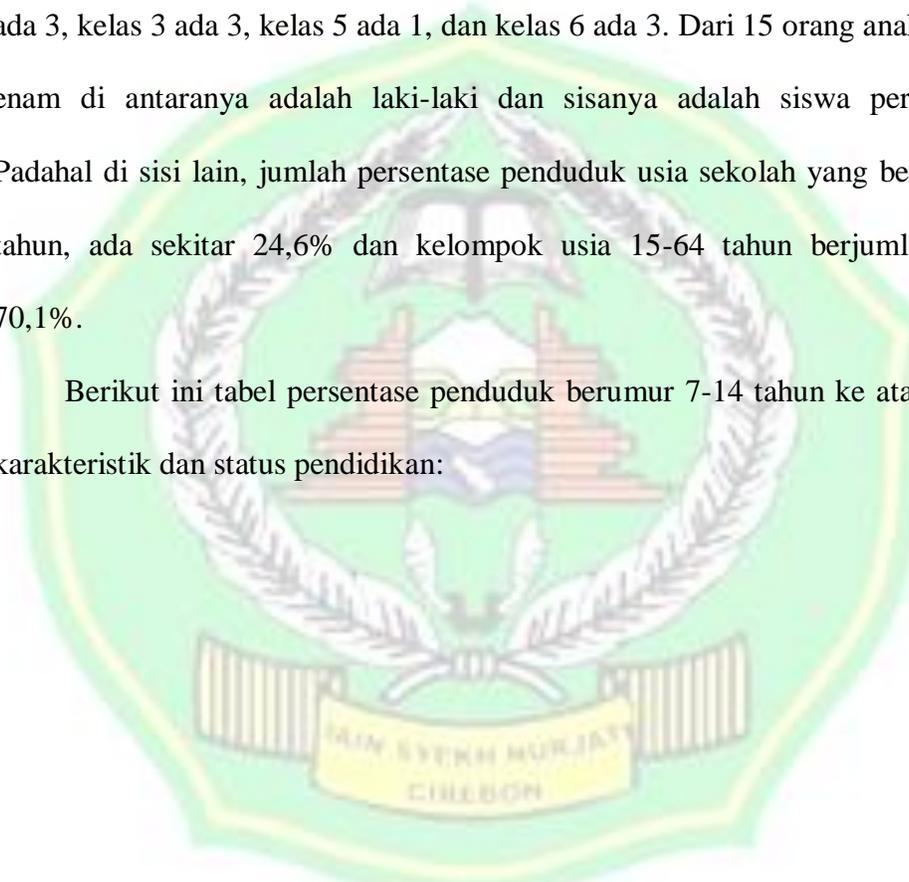
⁷ <http://www.cirebonkota.go.id/>

⁸ Penetapan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2014 saat ini membawahi 1 kota, dan 4 kabupaten lainnya seperti Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Indramayu.

meningkatkan kualitas dan kuantitas pedalaman agama serta pendidikan di tahun 2018-2023 secara lebih baik.⁹

Berdasarkan data statistik 2017, anak-anak putus sekolah di Kecamatan Harjamukti tertinggi yaitu berjumlah 15 orang anak; kelas 1 ada 5 orang, kelas 2 ada 3, kelas 3 ada 3, kelas 5 ada 1, dan kelas 6 ada 3. Dari 15 orang anak tersebut, enam di antaranya adalah laki-laki dan sisanya adalah siswa perempuan.¹⁰ Padahal di sisi lain, jumlah persentase penduduk usia sekolah yang berusia 0-14 tahun, ada sekitar 24,6% dan kelompok usia 15-64 tahun berjumlah sekitar 70,1%.

Berikut ini tabel persentase penduduk berumur 7-14 tahun ke atas menurut karakteristik dan status pendidikan:



Tabel 1. Data anak sekolah dan putus sekolah

Jenis Kelamin	Tidak/ belum pernah	Masih Sekolah				Jumlah
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Tidak bersekolah	

⁹ Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD tahun 2018-2023). Lihat cirebonkota.go.id.

¹⁰ Lihat laporan Tim Dinas Pendidikan Kota Cirebon. 2018. Buku Statistik Pendidikan Kota Cirebon Tahun 2017/2018. Cirebon: Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

	bersekolah				lagi	
Laki-laki	0,46	31,5	16,41	18,55	33,08	100
Perempuan	0	32,41	13,43	19,27	34,89	100

Sumber: katalog 4101002.3274 statistik kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2018.

Berdasarkan data di atas, anak-anak yang tidak bersekolah lagi termasuk sebanyak 33,08 persen untuk laki-laki dan 34,89 persen untuk perempuan. Jika dikalkulasikan dari jumlah keduanya, maka akan didapati angka yang cukup besar yaitu sekitar 67,97 persen. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya anak-anak usia sekolah yang justru tidak bersekolah lagi. Keadaan ini sangat memprihatinkan karena masih ada banyak anak-anak usia sekolah yang tidak lagi mengakses pendidikan. Padahal, berbagai program khususnya PIP ini sudah digalakkan dalam rangka pengentasan angka putus sekolah.

Selain temuan data dari Badan Pusat Statistik Nasional di atas, penulis juga kemudian mengumpulkan berbagai data di lapangan yang diperlukan untuk merumuskan metode dan hasil dari evaluasi Program Indonesia Pintar yang akan dilakukan melalui pengukuran tingkat keberhasilan dan kelemahan proses pendidikan yang sudah berjalan dari berbagai aspek yang berkaitan.¹¹ Mengingat evaluasi pendidikan dalam hal ini bisa saja diartikan sebagai suatu tindakan atau

¹¹ Nata, Abudin. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. (1997: hlm. 136).

suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan.¹²

Mengingat tingginya angka putus sekolah di Kecamatan Harjamukti, maka evaluasi terhadap sistem pendidikan perlu dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi anak putus sekolah. Evaluasi ini dilakukan sebagai sebuah proses yang menentukan apakah tujuan-tujuan program telah berhasil dicapai atau tidak. Lebih jauh, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), evaluasi perlu dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di antaranya terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan.¹³

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang evaluasi program. Meminjam terminologi dari Arikunto (2001), program dalam hal ini bisa saja dijabarkan sebagai *pertama*, rencana dan *kedua*, kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Sedikit berbeda dengan pendapat Arikunto tersebut, Tayibnapi (1989) menjelaskan bahwa program adalah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Sedangkan evaluasi program pendidikan memiliki dua makna, pertama

¹² Wand dan Brown dalam Syahril, Konsep Evaluasi Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Hunafa*. Vol. 4. Desember. (2007: hlm. 303).

¹³ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi aksara, hlm. 1

penilaian dikaitkan dengan hasil belajar, dan yang kedua memiliki makna yang lebih luas, yaitu penilaian terhadap program secara menyeluruh.¹⁴

Melihat perbedaan definisi seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka evaluasi program pendidikan dalam penelitian ini akan lebih menyederhanakan definisinya sebagai sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh penulis. Tentu saja untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan program pendidikan sudah dijalankan. Lalu, hasil dari penelitian ini sendiri akan dimanfaatkan sebagai salah satu kumpulan informasi yang dihasilkan dari konstruksi pengetahuan sekaligus pemikiran penulis dalam menganalisis evaluasi Program Indonesia Pintar di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti sudah dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, masalah utama yang akan dianalisis dan dieksplorasi dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan tingginya anak putus sekolah di Kecamatan Harjamukti. Padahal berbagai bantuan langsung tunai maupun beasiswa seperti BOS dan BSM sudah diberikan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan partisipasi pendidikan bagi masyarakat. Akan tetapi, tingginya angka putus sekolah mengindikasikan adanya faktor, sebab dan situasi tertentu yang belum berhasil. Karena itu, penulis perlu mengangkat tema penelitian terkait **Bagaimana proses Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) telaah tentang Aksesibilitas, Pencegahan dan**

¹⁴Dr. Mesiono, M.Pd., *Educators: Jurnal ilmu Pendidikan dan Kependidikan*, volume 4 nomor 2 Bulan Juli-Desember (Medan: Pusat Studi Pendidikan Rakyat 2017), hlm. 4

Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon?

1.2 Rumusan dan Fokus Masalah

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif diperlukan agar permasalahan tidak terlalu luas. Karena itulah, penelitian perlu dibatasi dalam analisis kerangka kerja penelitian yang mendalam dan komprehensif. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada Evaluasi Program Indonesia Pintar untuk menangani Anak Putus Sekolah pada masyarakat *urban fringe* di kecamatan Harjamukti, Adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah:

1. Bagaimana gambaran terkait fenomena anak putus sekolah di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti?
2. Bagaimana meningkatkan aksesibilitas siswa, pencegahan dan penanggulangan anak putus sekolah di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti?
3. Bagaimana evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menangani anak putus sekolah di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilaksanakan pasti memiliki tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran terkait fenomena anak putus sekolah di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti.
2. Menjelaskan tentang tindak lanjut Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka meningkatkan aksesibilitas siswa, pencegahan dan penanggulangan anak putus sekolah di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti.
3. Menjelaskan tentang evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menangani anak putus sekolah di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan kontribusi dan menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Terutama yang berkaitan dengan kajian evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menangani anak putus sekolah di Kecamatan Harjamukti.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan:

- a. dapat dijadikan sebagai referensi untuk mendalami pengetahuan seputar evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menangani anak putus sekolah di Kecamatan Harjamukti.
- b. menambah semangat dan memotivasi anak-anak yang mengalami kasus putus sekolah agar terus semangat untuk belajar.

1.4 Landasan Teori

Secara harfiah, evaluasi berasal dari Bahasa Inggris, "Evaluation" yang bisa diartikan sebagai penilaian atau penaksiran (Anas, 2013: 1). Selain definisi tersebut, evaluasi masih memiliki beberapa pengertian lainnya. Daniel L. Stufflebeam (2012: 28) misalnya menjabarkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses menggambarkan, memperoleh dan memberikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Lebih jauh, Shufflebeam dalam Wirawan menyatakan bahwa evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menilai kelebihan, probabilitas dan kepentingan suatu objek, untuk memandu keputusan layak, membuat, mendukung akuntabilitas, menyebarkan praktik yang efektif, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat¹⁵.

¹⁵Rusyadi dan Patahuddin, *evaluasi program indonesia pintar (pip) pada tingkat sekolah dasar di kota balikpapan*, jurnal UNM, hal.3.

Sedangkan menurut *William Dunn*, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan tujuan target, dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.¹⁶

Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, di mana suatu tujuan telah dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat, di mana suatu tujuan dapat dicapai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di antaranya terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan.¹⁷

Wirawan menjelaskan bahwa evaluasi merupakan riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilai dengan membandingkannya dengan indikator

¹⁶ Dwijwidjoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo kelompok gramedia, 2003), hlm. 185

¹⁷ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi aksara, hlm. 1

evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi.¹⁸

Pada prinsipnya, evaluasi menghasilkan pengetahuan yang dianggap relevan dengan program yang berisikan kesesuaian ataupun ketidaksesuaian antara kinerja program yang diharapkan dengan hasilnya. Hasil dari evaluasi yang dilakukan nantinya akan bisa membantu pengambilan program selanjutnya. Dimana hasil dari evaluasi tersebut bisa jadi berisikan klarifikasi, ataupun kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pembuatan program.¹⁹

Sementara itu, beberapa asumsi yang berkembang dalam proses evaluasi antara lain adalah *pertama*, evaluasi merupakan suatu kebutuhan dan mutlak diperlukan dalam suatu program. Mengingat manfaatnya, evaluasi menjadi sebuah hal yang harus dilakukan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suatu program. *Kedua*, evaluasi menjadi salah satu fungsi penting dalam sistem program. Dimana evaluasi dalam hal ini akan dikaitkan dengan setiap komponen dalam sistem program yang ada dan dimulai melalui tahapan formulasi, hingga pengembangannya. *Ketiga*, evaluasi program merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, apalagi jika dikaitkan dengan standar yang digunakan. Meskipun

¹⁸Wirawan, 2012, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 7.

¹⁹William N. Dunn, (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 28.

demikian, tidak berarti bahwa evaluasi program menjadi hal yang tidak mungkin untuk dilakukan dengan berhasil dan memperoleh hasil yang memuaskan.²⁰

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka evaluasi harus bisa memainkan beberapa fungsi utamanya secara baik, yaitu: *pertama*, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan dan target tertentu telah dicapai. *Kedua*, evaluasi memainkan peran untuk memberikan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. *Ketiga*, evaluasi memberikan sumbangsih terhadap pembuatan rumusan masalah dan rekomendasi program.²¹

Evaluasi juga bisa jadi berkaitan dengan pendidikan. Karena dalam proses pendidikan, evaluasi diperlukan untuk mengukur, menganalisis dampak dan mendorong rekomendasi yang berguna. Meminjam terminologi dari Ralph Tyler (1950) yang menyatakan bahwa evaluasi pendidikan secara sederhana bisa didefinisikan sebagai sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya.²²

²⁰Purwanto dan Suparman, dalam Ananda Rusydi dan Tien Rafida. (2017). *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing. Hal. 10.

²¹Dunn, (2010: 610).

²²Tyler menyatakan bahwa, “*Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are being realize*”, dalam Ralp W. Tyler, <http://wredu.com/~wriles/Tyler.html>.

Tak cukup sampai di situ, definisi lain juga perlu ditelisik untuk memahami konsep evaluasi pendidikan. Dalam hal ini penulis menemukan terminologi yang lebih kompleks dalam kaitannya dengan hasil belajar siswa. Dikatakan bahwa "*Evaluation is a process of making an assessment of student's growth*". Definisi ini kemudian bisa diartikan sebagai sebuah proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Pencapaian perkembangan siswa perlu diukur, baik posisi siswa sebagai individu maupun posisinya di dalam kegiatan kelompok.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, evaluasi pendidikan adalah suatu kegiatan untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai yang menghasilkan nilai sangat valid dengan tujuan mengendalikan nilai mutu pendidikan. Mengingat, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting sekaligus juga dinamis dalam kehidupan setiap orang, yang mempengaruhi kemampuan, kepribadian, lingkungan sosial dan moralitasnya.²³ Lebih jauh, Riant Nugroho bahkan menyebutkan bahwa pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang melekat pada kehidupan berbangsa maupun bernegara yang melibatkan proses peningkatan kemampuan adaptasi dan kapasitas sesuai dengan perkembangan zaman.²⁴ Karena pada dasarnya, setiap sekolah mendidik peserta didiknya agar menjadi anggota masyarakat yang berguna dan berdaya guna, baik dalam kapasitas sosialnya atau sebagai pribadi.

²³Dwi Siswoyo, (2011:17).

²⁴Riant Nugroho, 2008, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 20.

Mengingat luasnya cakupan bidang pendidikan, evaluasi pendidikan pada prinsipnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga cakupan penting, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem.²⁵ Hal ini sesuai dengan pasal 57 ayat 2, UURI No. 20 Tahun 2003, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.

Alasan yang melatarbelakangi mengapa perlu diadakannya evaluasi menurut Suharsimi (2012:14) terletak pada pemaknaan penting pada beberapa hal berikut ini:

1. Makna bagi siswa

Siswa mengetahui sejauh mana ia telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Hasilnya bisa berupa dua kemungkinan yakni memuaskan dan tidak memuaskan.

2. Makna bagi guru

- a) Guru mengetahui siswa mana yang sudah bisa melanjutkan materi berikutnya karena sudah mampu mencapai standar dari materi yang telah diberikannya, dan guru bisa memberikan perhatian yang proposional

²⁵ Sukardi, hlm. 5.

kepada masing-masing siswa sebagaimana hasil penilaian yang telah dilakukannya.

- b) Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa sehingga untuk memberikan pengajaran diwaktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan.
- c) Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakannya sudah tepat atau belum.

3. Makna bagi sekolah

- a) Hasil penilaian guru bisa menjadi gambaran pencapaian tujuan institusional. Artinya apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai harapan atau belum. Karena hasil penilaian belajar siswa bisa menjadi cermin kualitas suatu sekolah.
- b) Informasi dari hasil penilaian guru bisa menjadi bahan untuk menyusun perencanaan sekolah kedepannya.
- c) Informasi hasil evaluasi tahunan yang dilakukan oleh guru bisa menjadi bahan evaluasi sekolah, apakah proses pendidikannya sudah mencapai standar nasional atau belum, jika belum maka perbaikan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan.

Evaluasi program juga memiliki karakteristik khasnya, yang tentu saja berbeda dengan penelitian lainnya. Berikut ini penulis paparkan delapan

karakteristik evaluasi program sebagaimana yang dikutip dari pendapat Arikunto dan Jabar²⁶ yaitu:

1. Proses kegiatan evaluasi program tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya.
2. Evaluasi program dilaksanakan secara sistematis, artinya peneliti dalam hal ini perlu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kajian yang integratif dan terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi.
3. Perlu adanya identifikasi faktor penentu bagi keberhasilan program yang dirinci secara objektif sebagai bagian dari proses evaluasi.
4. Menggunakan standar, kriteria ataupun parameter sebagai alat pembanding untuk menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan yang relevan.
5. Kesimpulan ataupun hasil evaluasi program digunakan sebagai masukan ataupun rekomendasi bagi pengambilan kebijakan dan sesuai dengan rencana program yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, penulis harus bisa berorientasi pada standar, kriteria ataupun parameter yang perlu digunakan.
6. Informasi yang dihasilkan harus bisa menggambarkan kondisi riil dan rinci untuk mengetahui bagian mana dari program yang belum terlaksana, maka

²⁶Arikunto dan Jabar dalam Ananda Rusydi, (2017:13-14)

perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen, sampai pada indikator program yang dievaluasi.

7. Standar, kriteria ataupun parameter yang diterapkan pada indikator menggunakan bagian terkecil dari program agar dapat dicermati kelemahan pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan.
8. Evaluasi program harus bisa memberikan rekomendasi secara rinci dan akurat agar bisa diambil tindakan lebih lanjut secara proporsional.

Dalam penelitian ini, penulis akan memainkan peran sebagai evaluator eksternal²⁷ yang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melihat program secara objektif dan tidak melibatkan diri secara pribadi terhadap elemen-elemen ataupun konten yang akan dievaluasi. Sehingga penulis akan berusaha semaksimal untuk tidak memperhatikan hal-hal ataupun perspektif yang sifatnya subjektif yang dikhawatirkan mempengaruhi pelaksanaan proses evaluasi. Selain itu, beberapa kelebihan evaluator eksternal bisa terlihat dalam beberapa hal berikut; *pertama*, mampu bersikap objektif. *Kedua*, tidak terpengaruh dengan hubungan ataupun urusan personal. *Ketiga*, tidak terlibat dengan struktur kekuasaan yang ada. *Keempat*, tidak memperoleh keuntungan pribadi kecuali yang berkaitan dengan penelitian. *Kelima*, terbiasa dengan metode evaluasi dan dianggap sebagai seorang yang ahli dalam program. *Keenam*, tidak perlu terlibat dengan orang-orang ataupun program yang dievaluasi secara personal. *Ketujuh*,

²⁷Lihat Ananda Rusydi, (2017:25).

dapat menimbulkan kegelisahan karena staf program dan partisipan tidak mengetahui secara pasti motivasi seorang evaluator untuk menyelesaikan proses evaluasi yang dilakukannya.²⁸

Meskipun demikian, evaluator eksternal juga bisa jadi mengalami kondisi di mana hasil evaluasinya diambil secara kurang tepat. Hal ini bisa saja terjadi ketika evaluator program tidak mampu menjalin hubungan emosional. Sehingga ada keterbatasan dalam memperoleh, mengolah dan menghasilkan informasi yang mungkin ditutup-tutupi oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, evaluator program harus secara mandiri membiayai kebutuhan operasional selama proses evaluasi ini berlangsung.

Penelitian yang penulis angkat ini akan membahas tentang evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk menangani anak putus sekolah di Kecamatan Harjamukti. Sebelum membahas lebih jauh mengenai evaluasi Program Indonesia Pintar, berikut pengertian tentang Program Indonesia Pintar atau biasa disebut dengan PIP merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya. PIP dimulai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penyaluran manfaat PIP dilaksanakan dua kali dalam satu tahun anggaran. Penyaluran dana PIP dua kali

²⁸*Ibid.*

dalam setahun diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak adanya biaya.

Evaluasi program tentu saja tidak bisa dilepaskan dari tujuan program tersebut. Mengingat tujuan program ini merupakan titik awal yang menentukan apakah evaluasi diperlukan dan ataukah program sudah mencapai tujuannya. Meskipun bisa jadi, penulis akan mengembangkan proses evaluasinya melebihi indikator tujuan yang sudah ada. Adapun tujuan Program Indonesia Pintar yang penulis maksud antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya²⁹

²⁹ Kemendikbud, 2015, Hal. 2.

Program Indonesia Pintar ini memang sengaja dirancang untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Agar mendapatkan akses dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang merata. Pemerataan dalam konteks pendidikan di sini bisa saja dimaksudkan sebagai sebuah proses, cara dan mekanisme pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang berasal dari beragam kelas serta tidak memandang adanya bias di dalamnya.

Setidaknya, ada dua aspek terpenting ketika membicarakan soal pemerataan pendidikan yaitu persamaan dan keadilan. Persamaan dalam hal ini diartikan sebagai kesamaan peluang dan kesempatan untuk mengakses pendidikan. Masyarakat di wilayah perbatasan atau daerah terluar dan memiliki kontur wilayah di daerah pegunungan misalnya, tetap harus memiliki kesempatan yang sama dengan mereka-mereka yang ada di pusat kota untuk bisa mengakses sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Sementara adil bisa didefinisikan sebagai keadaanimbang dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dan merata bagi siapapun. Tanpa perlu memandang status sosial ekonomi, budaya, etnis, dan lain sebagainya.

Melalui pendidikan, pada dasarnya masyarakat justru memiliki peluang untuk melepaskan diri dari persoalan kemiskinan yang begitu dekat dan erat dengan mereka. Dimana kemiskinan yang dihadapi bisa jadi menggambarkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara

lingkungan pendukungnya tidak mampu memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan ataupun keluar dari kondisi rentan yang dialami.³⁰

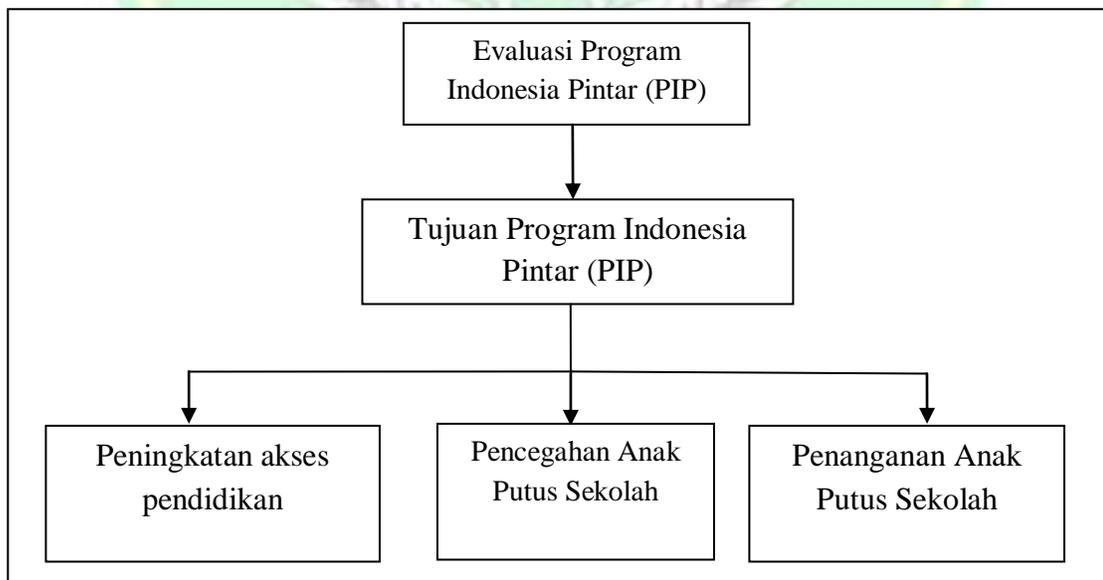
Beberapa sebab yang melatarbelakangi hubungan antara peningkatan kemiskinan dengan penurunan kualitas maupun kuantitas pendidikan antara lain, *pertama*, karakteristik wilayah. Dimana wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam *urban fringe*, perbatasan, ataupun daerah terluar biasanya memiliki berbagai keterbatasan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi maupun pendidikannya. *Kedua*, karakteristik masyarakat yang kurang menyadari arti pentingnya pendidikan, pola pikir tradisional, maupun tertutup menjadi alasan penguat kenapa pendidikan tidak tersentuh dengan baik, yang secara perlahan-lahan hal ini memungkinkan meningkatkan tingkat kemiskinan di suatu daerah. *Ketiga*, kapasitas individu yang bisa terlihat dari pola pikir, kesadaran maupun orientasi terhadap pendidikan. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap arti pentingnya pendidikan, maka semakin baik pula partisipasinya terhadap sarana dan proses pendidikan. Karena itulah, Program Indonesia Pintar ini perlu untuk dievaluasi. Terutama untuk mengukur dan mengetahui capaian nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Apalagi program ini memang dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan akses, pencegahan dan penanggulangan anak putus sekolah.

³⁰Ade Cahyat dan Gooner C, Houg M (2007:2)

Anak-anak putus sekolah yang memang sudah tidak mungkin lagi untuk mengikuti proses pendidikan di lembaga formal, bisa dialih dayakan untuk mengikuti proses pendidikan nonformal. Tentunya, partisipasi mereka terhadap pendidikan nonformal ini bisa dijadikan sarana meningkatkan keterampilan ataupun keahlian anak-anak putus sekolah. Sehingga mereka tetap bisa bersaing di dunia kerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan meng gambarkannya ke dalam sebuah bagan untuk memudahkan memahami alur dan kerangka berpikir yang dikembangkan dalam penelitian ini. Selain itu, bagan ini juga dibuat untuk menggambarkan hubungan antarvariabel yang diamati. Karena itulah, penulis menyajikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 1. Evaluasi Program Indonesia Pintar



1.5 Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan sangat diperlukan sebagai landasan berpikir untuk menentukan arah yang jelas terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian memiliki kedudukan sebagai pembaharu yang jelas terhadap penelitian yang sebelumnya. Penelitian yang baru bisa bersifat mendukung, menolak, melengkapi atau memiliki sudut pandang lain terhadap penelitian terdahulu. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa referensi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan dalam kasus anak putus sekolah. Diantaranya:

1. Jurnal karya Yenny Merinatul Hasanah dan Cepi Safruddin tahun 2017 yang berjudul "*Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah kota yogyakarta*". Jurnal Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Penelitian ini menggambarkan tentang evaluasi program wajib belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta bukan Compulsory Education, tetapi lebih merupakan Basic Education Program (BEP) yang didasari Universal Basic Education (UBE) yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk mengikuti pendidikan dasar terhadap anak. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun: Daya beli/tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, minat anak dan kesadaran orang

tua kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan, masih adanya anak putus sekolah di Kota Yogyakarta, sosialisasi program wajib belajar 12 tahun kurang maksimal, dan ketidaktepatan subsidi pemerintah terkait pendataan masyarakat miskin sehingga berpengaruh pada pembagian kartu dan kurangnya cross check ke lapangan terkait data masyarakat Kota Yogyakarta yang kurang mampu.

Persamaan Penelitian Yenny Merinatul Hasanah dan Capi Safruddin dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya sama membahas tentang evaluasi pendidikan.

Namun Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang kajian Anak Putus Sekolah yang terjadi di tingkat Sekolah Dasar hingga ke tingkat Menengah Atas.

2. Tesis karya Ina Umayani Tahun 2017 yang berjudul “*Evaluasi Program social campus responsibility dalam pendampingan anak putus sekolah di kota Surabaya*” Mahasiswa Program Ilmu Administrasi Negara, Universitas Airlangga.

Penelitian ini menggambarkan tentang evaluasi program *Campus Social Responsibility* dalam pendampingan anak putus sekolah di Kota Surabaya dilihat dari 6 kriteria evaluasi. Dari keenam aspek kinerja evaluasi tersebut di atas ada lima aspek yang dinilai cukup efektif. Meskipun ditemukan beberapa kendala yang menghambat program *Campus Social Responsibility* mencapai

tujuannya dan satu aspek yang tidak efektif. Adapun lima aspek yang efektif adalah akses, frekuensi, ketepatan pelayanan, akuntabilitas, kesesuaian. Sedangkan satu aspek yang tidak efektif adalah cakupan (*coverage*), dalam pelaksanaan program *Campus Social Responsibility* cukup mampu menjangkau masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program yaitu anak putus sekolah.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Inda Umayani di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya membahas tentang evaluasi terhadap anak putus sekolah.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang penyebab Anak putus sekolah dan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk anak yang mengalami putus sekolah.

3. Ejournal Administrasi Negara karya Arbainah tentang Evaluasi Program Indonesia Pintar di Desa Tajur kecamatan Long ikis kabupaten Paser yang membahas tentang permasalahan- permasalahan yang ada di Desa Tajur terkait PIP.

Penelitian ini menggambarkan tentang perataan/kesamaan dari Program Indonesia Pintar di Desa Tajur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser ini belum terdistribusi secara adil dan Responsivitas dari Program Indonesia Pintar yakni tanggapan positif serta antusias dari orang tua dan peserta didik sebagai sasaran penerima Program Indonesia Pintar.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang dilakukan oleh Arbainah di atas adalah saudara Arbainah tidak mendalami lebih banyak tentang upaya penanganan terhadap anak putus sekolah. Adapun persamaan penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang evaluasi Program Indonesia Pintar.

4. Jurnal karya Agus Setiawan yang berjudul “*Anak putus sekolah pada masyarakat marginal di perkotaan* (Studi terhadap masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru)”.Jom Fisip Vol. 2 No.1 Februari 2015.

Penelitian ini menggambarkan tentang penyebab anak putus sekolah di Kecamatan rumbai bahwasannya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor motivasi dari dalam diri anak itu sendiri untuk sekolah, faktor ekonomi keluarga dan faktor lingkungan.

Persamaan penelitian yang dilakukan gus Setiawan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya membahas tentang evaluasi terhadap anak putus sekolah. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis akan membahas Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam menangani Anak Putus Sekolah pada masyarakat *Urban fringe*.

5. Tesis karya Lestyowati Endang Widyantari yang berjudul “*Kecenderungan anak putus sekolah ditinjau dari faktor ekonomi dan faktor non ekonomi*”

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia.

Dalam penelitian ini membahas tentang anak putus sekolah yg disebabkan oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Dilihat dari faktor ekonomi, anak-anak yang mengalami putus sekolah harus berjuang memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jika dilihat dari faktor non ekonomi, dikarenakan anak-anak malas bangun pagi dan juga malas mengerjakan tugas-tugas sekolah. Selain itu pengaruh lingkungan, yang saat ini berkembang seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi.

Dalam penelitian ini, sama membahas tentang anak putus sekolah. Namun sedikit berbeda karena dalam tesis ini tidak membahas tentang Program Indonesia Pintar.

6. Jurnal Manajemen Pendidikan Volume: 6, No. 1, Januari-Juni 2019 karya Wirastiani, Bambang Ismanto dan Wasitohadi yang berjudul “*Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama*”.

Di dalam penelitian ini membahas tentang Evaluasi Program Indonesia Pintar yang dilihat dari beberapa segi. Yang pertama Dari *segi instalasi* tidak terdapat kesenjangan antara rancangan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga dengan Juknis pelaksanaan PIP dari pemerintah. Dari *segi proses* masih terdapat kesenjangan antar desain dengan pelaksanaan akibat berbagai kendala seperti

penyaluran dana yang sering terlambat. Dari *segi produk* juga masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan PIP di SMP Negeri 7 Salatiga karena dana yang diterima masih kurang, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan sekolah sesuai dengan Juknis. Dari *segi Analisis Manfaat dan Biaya* juga masih terdapat kesenjangan karena walaupun peserta didik penerima PIP merasakan manfaat dari Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan di SMP Negeri 7 Salatiga. namun dana yang diterima setiap tahun masih sangat kurang.

Perbedaan penelitian dalam jurnal ini adalah, tidak membahas tentang anak putus sekolah. Melainkan evaluasi PIP ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama bukan terhadap anak putus sekolah.

7. Skripsi karya Saras Setyawati yang berjudul “*Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap: Studi Permendikbud No. 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar*”, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto.

Penelitian ini membahas tentang tingkat efektivitas dan analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar di SMK Jeruklegi, Cilacap. Beberapa faktornya antara lain *pertama*, informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara *online*. *Kedua*, itu juga yang berkaitan dengan data dapodik yang dijadikan acuan bagi pemerintah untuk menentukan sasaran penerima KIP. *Ketiga*, adanya rasa saling percaya antara

pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP. *Keempat*, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Selain faktor tersebut, terdapat juga faktor penghambat yaitu evaluasi Program KIP yang dilaksanakan setiap periode menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme, penyelewengan dana dan kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana.

Perbedaan penelitian tersebut terletak pada peserta didik yang masih aktif sekolah dan mengukur efisiensi penggunaan dana. Sementara penelitian yang penulis susun lebih memfokuskan pada bagaimana evaluasi PIP ini berjalan terutama pada anak-anak yang sudah putus sekolah. Terlepas dari orientasi penilaian yang tersusun dalam tujuan PIP.

8. Jurnal "*Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SDN Magersari Kabupaten Rembang*" yang ditulis oleh Didik Mulya Setyawan pada *Indonesia Journal of Development Economics*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang tahun 2018.

Penelitian ini mengkaji tentang identifikasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), serta kendala yang ditemukan di dalam prosesnya tersebut. Adapun prosesnya dilakukan melalui tahapan sosialisasi, usulan, verifikasi hingga penyaluran dana. Meskipun terdapat kendala selama proses penyaluran dana kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan

atau salah dalam penyaluran kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak karena alasan kesalahan administrasi.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada proses implementasi dan evaluasi yang berbeda. Akan tetapi jurnal ini memberikan rekomendasi yang relevan terkait dengan pengelolaan dana PIP yang seharusnya diprioritaskan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

9. Jurnal “*Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama*” karya Wirastiani Binti Yusup, Bambang Ismanto dan Wasitohadi pada Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan, FKIP Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2019.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi desain, instalasi, proses, produk dan analisis keuntungan serta biaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan PIP dalam rangka meningkatkan akses pendidikan di SMPN 7 Salatiga yang meliputi aspek objektif, proses, sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur yang digunakan.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah dan objek kajiannya yang tidak mengkaji tentang anak putus sekolah. Tapi lebih kepada proses implementasi programnya.

10. Jurnal “*Evaluasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kabupaten Mojokerto*” oleh Milda Selvia Wulansari,

Agus Timan dan Ahmad Nurabadi pada Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Penelitian ini mengkaji soal mekanisme penerimaan, penggunaan dan penyimpanan dana PIP di SMPN Kabupaten Mojokerto. Kajian ini sekaligus membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan, mengingat objek, fokus dan wilayah penelitian. Sementara penulis melakukan penelitian dengan meletakkan fokus pada anak putus sekolah dengan berpedoman pada tujuan program dan atau tidak sama sekali. Sehingga, penelitian yang penulis kembangkan akan lebih mendalami tentang pendidikan nonformal.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis kemudian melakukan riset dengan menciptakan kebaruan tema, subjek, objek dan waktu pelaksanaan penelitian. Hal ini tetap dilakukan dalam kerangka Evaluasi Program Indonesia Pintar melalui pendekatan karakteristik wilayah *urban fringe* dengan ciri masyarakat desa kota di Kecamatan Harjamukti. Dimana masyarakat di wilayah ini memiliki permasalahan khas dan unik yang berkaitan erat dengan kondisi geografis, sosial dan ekonomi masyarakatnya. Selain itu, pemilihan masyarakat *urban fringe* ini ditentukan karena wilayah ini memiliki anak putus sekolah tertinggi sewilayah Kota Cirebon.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif karena prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.³¹ Penelitian kualitatif perlu dilakukan untuk mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang merasa tertarik secara alamiah,³² yang dengan sengaja dirancang untuk mengetahui derajat tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.³³ Karena itu, penelitian ini tetap perlu memperhatikan beberapa elemen yang terlibat di dalamnya. Agar penelitian bisa berjalan secara komprehensif dan sistematis.

Evaluasi program dengan menggunakan desain kualitatif memiliki ciri yang lebih fleksibel dalam metode pengumpulan datanya dan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang nantinya bertujuan untuk membangun teori baru. Sedangkan pada evaluasi program, informasi yang dikumpulkan sebisa mungkin dilakukan pada awal penentuan desain dan tidak terjadi perluasan informasi dengan alasan mencari titik jenuh kepuasan peneliti dalam mengumpulkan informasi.³⁴

³¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 82.

³²David Williams dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 5.

³³Arikunto dalam Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 6.

³⁴David Royce, dkk dalam Mimin Nurjhani K. *Pendekatan, Desain dan Prosedur Evaluasi Program: Evaluasi Kualitatif dan Evaluasi Kuantitatif*. Makalah. (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2007), hlm. 7.

Beberapa elemen penelitian yang perlu diperhatikan antara lain; *pertama*, penentuan fokus yang akan dievaluasi (*focusing the evaluation*), *kedua*, penyusunan desain evaluasi (*designing the evaluation*). *Ketiga*, pengumpulan informasi (*collecting information*). *Keempat*, analisis dan interpretasi informasi (*analyzing and interpreting*). *Kelima*, pembuatan laporan (*reporting information*). *Keenam*, pengelolaan evaluasi (*managing evaluation*), dan *ketujuh*, evaluasi untuk evaluasi (*evaluating evaluation*).³⁵

Dalam rangka mencegah evaluator kehilangan fokus, maka evaluator bisa menggunakan pendekatan FQE (*Focused Qualitative Evaluation*) selama prosedur evaluasi program berlangsung. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bisa menggunakan catatan tentang kasus, pedoman wawancara, kuesioner, transkripsi rekaman suara, video, foto, sosiogram, reka ulang ataupun *judicial review*.³⁶ Setelah itu, data yang diperoleh harus mulai diorganisasikan sedemikian rupa berdasarkan relevansinya terhadap suatu fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi selama evaluasi berlangsung. Dianalisis lalu disajikan dalam bentuk cerita yang lengkap serta rinci.

Mengingat pentingnya mengetahui tingkat keberhasilan program pendidikan yang berkaitan erat dengan Program Indonesia Pintar dalam

³⁵Brikerhoff dalam Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 18.

³⁶Mimin Nurjhani K, (2007:8).

penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengembangkan model evaluasi program yang sebelumnya sudah dikembangkan oleh Scriven mengenai *goal free evaluation approach* atau pendekatan evaluasi bebas tujuan, yang menurut Kifer bahkan disebut-sebut sebagai kajian semua dampak atau hasil akhir secara integratif.

Model *goal free* ini juga perlu memperhatikan soal keberadaan program apakah bermanfaat atautkah tidak atas dasar penilaian kebutuhan yang ada di wilayah *urban fringe* Kecamatan Harjamukti. Dalam model *goal free* ini, penulis tidak hanya perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan Program Indonesia Pintar, tapi juga perlu memperhatikan bagaimana kinerja program dengan cara mengidentifikasi pengaruh-pengaruh yang terjadi baik yang bersifat positif maupun negatif.

Fokus model ini terletak pada bagaimana seorang evaluator memperhatikan perubahan perilaku yang terjadi sebagai bagian dari dampak program yang diimplementasikan, memperhatikan efek sampingnya dan membandingkannya sebelum program dilaksanakan. Selain itu, model ini juga mengkaji perihal besaran biaya yang dikeluarkan oleh program tersebut (*cost benefit analysis*).³⁷

Dengan mempertimbangkan beberapa hal yang sudah penulis paparkan di atas, maka metode kualitatif yang digunakan perlu

³⁷Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm, 55.

disempurnakan dengan melibatkan format deskriptif ataupun ekplanasi. Mengingat data yang diperoleh di lapangan yang meliputi hasil pengamatan, hasil wawancara dan hasil analisis dokumen tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka melainkan diruangkan dalam bentuk uraian naratif. Terutama yang berkaitan dengan penelaahan anak putus sekolah di wilayah *urban fringe* di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Lebih jauh, menurut Scriven, evaluasi program berbasis *goal free* ini perlu dilakukan melalui interpretasi penilaian ataupun eksplanasi yang memungkinkan hasil penelitian ini untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan sekaligus juga menyediakan informasi yang dibutuhkan.

Adapun beberapa ciri-ciri yang berkaitan dengan model *goal free evaluation* ini adalah:

1. Evaluator sengaja menghindar untuk mengetahui tujuan program.
2. Tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan untuk menyempitkan fokus evaluasi.
3. Evaluasi bebas tujuan berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang direncanakan.
4. Hubungan evaluator dan pengelola program dibuat seminimal mungkin.

5. Hasil evaluasi memungkinkan untuk ditemukannya dampak yang sebelumnya tidak direncanakan.³⁸

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasidalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon, UPT Pendidikan Kecamatan Harjamukti, dan Sekolah pemegang KIP terbanyak di Kecamatan Harjamukti yaitu Cadasngampar dan Silih Asih.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³⁹Sumber data yang digunakan untuk memperoleh informasi-informasi dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti.

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

³⁸Tayibnapis dalam Rusydi Ananda dan Tien Rafida, *Ibid*.

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 172.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 308.

atau lewat dokumen.⁴¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, arsip, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan kasus Anak Putus Sekolah.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen.

1) Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipasi/berperanserta. Observasi partisipasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan.⁴³

Observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tentang Program Indonesia Pintar di kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah mengamati keadaan situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat yang putus sekolah, sekolah-sekolah yang memiliki KIP.

⁴¹ Sugiyono, hlm. 309

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

⁴³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, cet. 1*, (Bandung: PT RefikaAditama, 2012), 209.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.⁴⁴

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁴⁵

Wawancara mendalam ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait Kasus anak putus sekolah di kecamatan Harjamukti kota Cirebon. dalam penelitian ini wawancara mendalam telah dilakukan kepada:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas pendidikan Kota Cirebon
2. Koordinator Wilayah Harjamukti Kota Cirebon
3. Sekretaris PNF Kecamatan harjamukti

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen, cet. .5*(Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

⁴⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 111.

4. Guru SD dan guru yang mengajar PKBM serta guru yang banyak terlibat tentang bantuan siswa miskin
 5. Orangtua yang anaknya mengalami putus sekolah.
- 3) Studi Dokumen

Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.⁴⁶ Teknik ini digunakan untuk mempelajari data-data terkait penelitian dari berbagai sumber seperti dokumen-dokumen tertulis terkait kasus Anak Putus Sekolah di kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Selain dokumen tertulis ada pula bentuk dokumen lain yaitu berupa foto kegiatan, video, dan rekaman.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan melalui cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.⁴⁷ Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:⁴⁸

⁴⁶Toto Syatori Nasehuddien, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*,(Cirebon: Nurjati Press, 2011), 98.

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 248.

1) Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo). Dari reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.

2) Model Data (*Data Display*)

Kita mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 129-133.

⁴⁸ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 129-133

pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.

3) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Setelah melalui tahapan model data, maka permulaan pengumpulan data peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi.

1.6.6 Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Selanjutnya, Denzin (1978) dalam Gunawan, membedakan empat macam triangulasi, yaitu (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode, (3) triangulasi peneliti, dan (1) triangulasi teoritik.⁴⁹

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu

⁴⁹Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, cet 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 219.

melalui berbagai sumber memperoleh data.⁵⁰Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain.Sementara itu, terkait penggunaan metode triangulasi yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas yang kemudian dilampirkan dalam penelitian ini.



⁵⁰*Ibid*, hlm. 219-221.